BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan salah satu bentuk dari organisasi yang mudah ditemui di Indonesia. Asas koperasi yang menjunjung tinggi kekeluargaan dalam kegiatannya akrab dengan budaya yang telah mendarah daging dalam masyarakat. Selain itu koperasi juga memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat dengan ekonomi lemah. Sebagai contoh, koperasi simpan pinjam dapat memberikan solusi pendanaan bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa koperasi tetap mempertahankan eksistensinya di tengah perkembangan ekonomi yang menyediakan berbagai alternatif ragam organisasi lain. Oleh karena itu, koperasipun menjadi menarik untuk dijadikan objek penelitian di berbagai bidang ilmu.

Pemerintah secara tegas menetapkan kebijakan yang terdapat dalam undang-undang dasar tahun 1945 dalam pasal 33 ayat 1 yang menyatakan "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Koperasi harus tampil sebagai badan usaha yang dapat mengumpulkan dan membentuk ekonomi bersama-sama untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi anggotanya. Seperti yang ada dalam peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 12/Per/M.KUKM/VII/2015 yang menjelaskan bahwa "koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Agar tujuan nasional dapat tercapai dan koperasi dapat bersaing dengan badan usaha lainnya, maka koperasi perlu juga dikembangkan dalam bidang sektor-sektor lainnya seperti industri, perdagangan, angkutan, dan lain-lain. Usaha tersebut harus disertai dengan pembinaan agar peranan koperasi meningkat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat semakin besar, dan laba yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut makin dinikmati dan bermanfaat bagi anggotanya.

Seiring dengan perkembangan koperasi yang terus meningkat, pengelolaan profesional koperasi sangat dibutuhkan terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Selain itu kurangnya kemampuan pelaku koperasi dalam bidang pengelolaan usaha juga termasuk kendala yang dihadapi koperasi yaitu rendahnya pendidikan dan kurangnya pengalaman pelaku tersebut dalam bidang akuntansi. Pengelolaan keuangan yang baik masih sulit diterapkan di badan usaha seperti koperasi dan badan usaha lainnya. Untuk itu koperasi dituntut untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya masyarakat luas pada umumnya. Salah satu bentuk transparansi yang harus dilakukan koperasi adalah dengan cara menyusun dan menerbitkan laporan keuangan organisasinya.

Laporan keuangan koperasi dapat memberikan informasi mengenai perkembangan atau kemunduran koperasi. Dalam laporan keuangan koperasi tercatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu

periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan SHU yang diperoleh, sumber daya ekonomi yang dimiliki, dan dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya.

Proses dalam penyusunan laporan keuangan, profesi akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpanan, dan ketidak tepatan. Untuk meminimumkan bahaya ini, profesi akuntansi mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang disebut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Di Indonesia prinsip akuntansi ini, disusun dalam standar akuntansi keuangan (SAK). Standar akuntansi adalah pedoman pokok penyusunan dalam penyajian laporan keuangan yang harus di pahami oleh setiap perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya. Sama halnya dengan organisasi lain, salah satu bentuk transparansi yang harus dilakukan koperasi adalah dengan cara menyusun dan menerbitkan laporan keuangan organisasi dengan mengikuti standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 8 April 2011 telah menerbitkan pernyataan pencabutan Standar Akuntansi Keuangan no. 8 (PPSAK 8) atas pencabutan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi Koperasi, dan digantikan dengan SAK yang mengacu pada IFRS. Standar Akuntansi keuangan yang mengacu pada IFRS dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum).

Standar akuntansi keuangan – entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) disusun oleh dewan standar akuntansi keuangan – ikatan akuntansi indonesia (DSAK-IAI) sebagai solusi bagi perusahaan menengah dan kecil yang sering menemukan kesulitan dalam menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang selama ini berlaku. dan mensahkan SAK Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik dalam menyajikan laporan keuangan. Entitas tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Undang-undang no 25 tahun 1992 tentang perekonomian, pasal 35 disebutkan bahwa setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :

1. Neraca
2. Perhitungan hasil usaha
3. Catatan atas laporan keuangan
4. Laporan perubahan ekuitas (modal)
5. Laporan arus kas

Koperasi Simpan pinjam “CITRA ABADI” yang bergerak dalam bidang serba usaha seperti membeli dan menjual barang jadi, memiliki persediaan dalam bentuk barang jadi atau barang dagangan yang akan dijual sebagai sumber pendapatan koperasi. Koperasi CITRA ABADI juga menjalankan kegiatan simpan pinjam yang tidak memiliki akuntabilitas

publik signifikan karena hanya menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Oleh sebab itu, koperasi CITRA ABADI harus menggunakan SAK ETAP sebagai standar akuntansinya sesuai dengan peraturan menteri koperasi dan UMKM nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015.

Dalam menyusun laporan keuangannya Penyusunan laporan keuangan wajib dilakukan sebagai salah satu laporan pertanggung jawaban tahunan koperasi yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).dan Laporan Keuangan yang disusun oleh Koperasi Simpan pinjam "CITRA ABADI" telah di laporkan dan diperiksa oleh Dinas Koperasi Kabupaten Mojoketo.Namun belum pernah di audit oleh KAP maupun auditor. karena Penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada koperasi KSP Citra abadi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia untuk penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

Dengan adanya SAK ETAP pencatatan laporan keuangan Koperasi KSP Citra Abadi bisa memudahkan pencatatan akuntansi yang lebih sederhana di bandingkan SAK UMUM dan dengan adanya SAK ETAP sehingga bisa di audit atas laporan keuangan yang telah disusun oleh KSP CITRA ABADI

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan menyusunnya dalam bentuk laporan akhir yang berjudul "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan KSP Citra Abadi".

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan SAK ETAP pada KSP Citra Abadi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik(SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan KSP Citra Abadi Mojokerto?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis laporan keuangan pada KSP Citra Abadi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti/Penulis

Penelitian ini sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah di pelajari di perguruan tinggi dan menambah pengetahuan peneliti dengan mengetahui kesesuaian dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

b. Bagi pembaca

Diharapkan dapat menambah informasi ,memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai tentang pembuatan dan

penyajian laporan keuangan koperasi yang sesuai SAK ETAP.

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi tambahan dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan yang akan datang sesuai dengan SAK ETAP.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Perusahaan dalam kaitanya pembuatan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP